



PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN KIP

Informasi Publik Merupakan Hak Masyarakat

YOGYA (KR) - Informasi publik adalah hak masyarakat, dan tugas pemerintah adalah memastikan hak itu terpenuhi. Karena pada dasarnya keterbukaan akan informasi adalah cara pemerintah menghormati warganya. Untuk itu monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi penting, bukan sekadar proses penilaian, tetapi proses pembelajaran.

Monev memberi ruang bagi pemerintah untuk melihat kesenjangan, seperti apa yang sudah berjalan, apa yang masih tertahan, dan apa yang memerlukan perbaikan.

"Informasi publik sudah seharusnya dapat diakses masyarakat dengan cara yang mudah, cepat, dan bertanggung jawab. Realitasnya, pemerintahan sering menganggap transparansi saja sudah cukup. Padahal transparansi hanyalah bagian kecil dari keterbukaan. Transparansi mengizinkan pemerintah memilih informasi apa yang ingin disampaikan. Tetapi keterbukaan mengingatkan pada

prinsip berbeda, bahwa informasi yang dihasilkan oleh badan publik bukan milik institusi, melainkan milik masyarakat yang dilayani," kata Wakil Gubernur (Wagub) DIY, Sri Paku Alam X dalam acara Penganugerahan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik. Bertempat di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Kamis (27/11).

Paku Alam X mengungkapkan, penghargaan KIP bukanlah akhir, melainkan menjadi pengingat bahwa standar keterbukaan terus bergerak. Untuk badan publik yang masih berproses, perlu memahami bahwa komitmen dan upaya nyata

perlu dilakukan untuk terus memperbaiki diri.

Sedangkan Ketua Komisi Informasi Daerah DIY, Erniati melaporkan, melakukan monitoring dan evaluasi atau monev KIP di badan publik menjadi salah satu tugas KID di daerah. Monev KIP tahun 2025 telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan, dari bulan Juni sampai dengan awal bulan November 2025.

"Peserta monev KIP tahun 2025 ini diikuti oleh 534 badan publik. Jumlah ini meningkat dari 419 badan publik di tahun 2024. Peningkatan jumlah peserta ini disebabkan jumlah kalurahan/kelurahan yang

mengikuti monev bertambah menjadi 196 atau 50 persen dari total kalurahan/kelurahan yang ada di DIY," ungkapnya.

Menurutnya, berdasarkan hasil monev tahun 2025, ada 9 kategori penghargaan. Pertama, kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY sebanyak lima badan publik, kemudian kategori OPD di Pemda DIY sebanyak 40 badan publik. Selanjutnya, kategori OPD Pemda Kabupaten/Kota DIY sebanyak 155 badan publik dan kategori Kaparewon/Kemantren se-DIY sebanyak 78 badan publik. Kelima, kategori Kalurahan/Kelurahan se-DIY sebanyak 196 badan publik, kategori BUMD sebanyak 18 badan publik, kategori instansi vertikal sebanyak 18 badan publik, kategori instansi non struktural sebanyak 13 bagian publik, serta kategori lembaga yudikatif sebanyak



Wagub DIY Sri Paku Alam X menyerahkan penghargaan kepada Hari Edi Tri Wahyu Nugroho.

11 badan publik.

"Dari hasil monev tahun 2025 didapati badan publik dengan predikat informatif sebanyak 63 badan publik, badan publik dengan predikat menuju informatif sebanyak 159 badan publik, dan badan publik dengan predikat cukup informatif sebanyak 181 badan publik.

Sedangkan badan publik dengan predikat kurang informatif sebanyak 55 badan publik serta badan publik dengan predikat tidak informatif sebanyak 76 badan publik," paparnya.

Lebih lanjut Erniati menambahkan, untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY, nilai tertinggi

diraih Pemerintah Kota Yogyakarta dengan skor 96,7. Untuk kategori OPD di Pemda DIY nilai tertinggi diraih Dinas Kesehatan DIY, sedangkan untuk kategori OPD Pemda Kabupaten/Kota DIY nilai tertinggi diraih Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul.

(Ria)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005